

# BAB I PENDAHULUAN

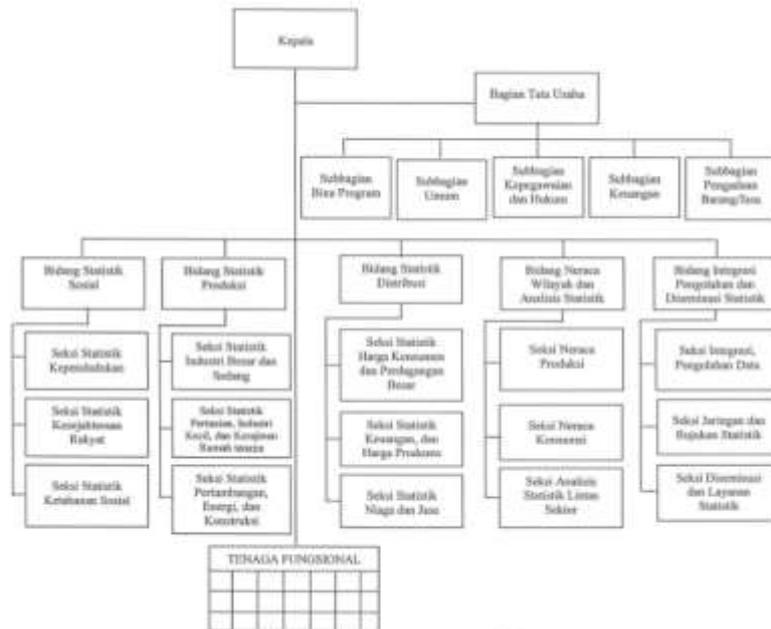
## 1.1 Latar Belakang

Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang bertanggung jawab langsung kepada presiden dan tugasnya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (BPS). BPS adalah institusi penyelenggara yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik yang dijelaskan dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Standar Pelayanan Statistik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 Pasal 11 disampaikan bahwa penyelenggara pelayanan dapat melakukan pelayanan publik dengan memperpendek proses pelayanan, mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan. Hal tersebut menjadi tolak ukur dalam menetapkan standar pelayanan statistik terpadu yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan komitmen Badan Pusat Statistik dalam rangka pelayanan statistik terpadu yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

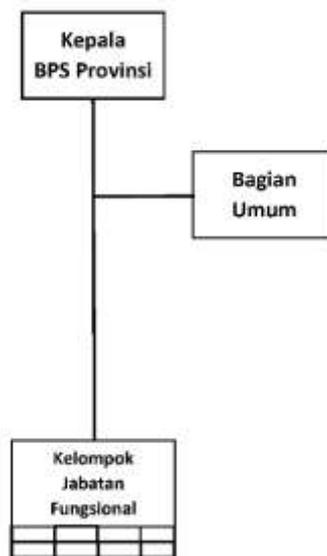
Pelayanan publik adalah sebuah tuntutan yang lahir dari masyarakat dalam memperoleh hak yang layak dari aparatur pemerintahan agar terpenuhinya kebutuhan masyarakat (Rohayatin et al., 2022). Namun, pemerintah telah lama menjadi pusat perhatian masyarakat terkait kasus pelayanan publik yang kurang maksimal diberikan kepada masyarakat. Pemerintah belum dapat menyediakan pelayanan publik yang berkualitas menyesuaikan tantangan akan perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin maju. Budaya organisasi birokrasi yang merupakan salah satu penyebab dari kualitas pelayanan publik yang rendah. Reformasi birokrasi merupakan kebtuuhan yang harus dipenuhi dengan tujuan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi kualitas dan kinerja pemerintahan dalam menciptakan sistem kerja yang efisien, responsif, dan akuntabel (Prabowo, H. et al., 2022)

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional menyebutkan “untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik.” Penyederhanaan birokrasi tersebut untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis, gesit, dan profesional (Nurhestitunggal & Mukhlisin, 2020). Penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional memerlukan panduan atau peraturan terkait pola hubungan kerja yang baru. Hal ini sangat diperlukan karena BPS merupakan instansi vertikal dengan banyak satuan kerja yang memerlukan keseragaman dalam pelaksanaan kegiatan. Disebutkan juga bahwa tantangan lain yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah perubahan budaya kerja yang *agile*, fleksibel, kolaboratif, dan sinkronisasi antar pegawai Badan Pusat Statistik (Badan Pusat Statistik, 2022). Sedangkan, Fenomena yang ditemukan adalah pegawai kantor BPS memiliki keterbatasan dalam memenuhi tantangan tersebut, karena penerapan

layout ruang dan fasilitas pada kantor Badan Pusat Statistik yang tidak sesuai standar dan tidak mendukung untuk menerapkan budaya kerja yang diinginkan.



**Gambar 1. 1 Struktur Organisasi BPS (Sebelum penyederhanaan birokrasi)**  
 Sumber : Peraturan BPS Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS



**Gambar 1. 2 Struktur Organisasi BPS (Setelah penyederhanaan birokrasi)**  
 Sumber : Peraturan BPS Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS

Berdasarkan regulasi pemerintah, untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi, BPS telah membuat peraturan Nomor 8 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata kerja BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/kota yang menjelaskan struktur organisasi fungsional sebagai pola hubungan kerja yang baru, guna mewujudkan organisasi yang lebih proposional, efektif dan efisien. Terdapat perbedaan struktur organisasi sebelum dan setelah adanya regulasi penyederhanaan birokrasi. Struktur awal yang terdiri dari kepala, kabag umum, kepala sub bagian, sub bagian, dan tenaga fungsional (gambar 1.1). kemudian setelah penyederhanaan struktur menjadi kepala, kabag umum, dan kelompok jabatan

fungsional (gambar 1.2). Penyederhanaan ini menjadikan pengelompokan user yang berubah menjadi lebih sederhana dengan penggabungan kepala sub bagian, dan sub bagian masuk dalam kelompok tenaga fungsional. Sehingga dalam pelaksanaan tugas, kelompok jabatan fungsional memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi sesuai dengan bidang keahlian.

Sistem fungsional yang diterapkan pada pegawai memberikan pengaruh terhadap sistem kerja dan sistem pelayanan yang diberikan karena berubahnya aktivitas pengguna dan penggunaan ruang yang berubah juga. Berubahnya tata ruang kerja yang menerapkan sistem kubikal menjadi fungsional yang diharapkan, setiap jabatannya bisa berdiskusi dan berkolaborasi dalam meningkatkan kinerja dan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Pada kantor Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta belum adanya penyesuaian desain tata ruang yang menyesuaikan perubahan struktur jabatan menjadikan banyak permasalahan yang mengganggu fungsi antar ruang saat melakukan aktivitas. *Layout* area kerja yang masih menerapkan sistem area kerja kubikal, menjadikan gerak pegawai lebih terbatas dalam berkomunikasi, organisasi ruang yang memiliki banyak sekat sehingga menghambat mobilitas pegawai dalam memberikan pelayanan, penetapan 2 ruang dengan kebutuhan yang berbeda sehingga tidak memaksimalkan fungsi pada masing-masing ruang seperti adanya penempatan ruang pelayanan statistik yang bersebelahan dengan perpustakaan. Kedua ruang dengan kebutuhan akan tingkat kebisingan yang berbeda berada dalam satu area tanpa sekat sehingga saling terganggu. Pada setiap ruang juga memiliki fasilitas yang disediakan sangat tidak efisien baik dalam ukuran maupun penempatannya dan diadakan tidak menyesuaikan kebutuhan sehingga menghalangi sirkulasi saat bekerja. Belum adanya kejelasan antar ruang kerja pada tiap bagiannya, sehingga tidak memiliki pembeda yang memudahkan pegawai/pengguna lain dalam menemukan hal yang dibutuhkan baik dalam menyelesaikan pekerjaan maupun dalam proses memberikan pelayanan.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas, mulai dari *layout* ruang, organisasi ruang, sirkulasi ruang, hingga kejelasan ruang yang masih sangat minim, berkaitan erat dengan kompleksitas yang terjadi didalamnya. Penggunaan metode *space syntax* dalam perancangan ini, untuk menyelesaikan permasalahan yang ditemukan di objek perancangan tentang integritas ruang, berkaitan dengan permasalahan akan ruang terkait alur sirkulasi, konektivitas antar ruang, *signage* yang masih belum jelas sehingga pendekatan ini cocok digunakan untuk menjawab permasalahan dari objek perancangan karena metode pendekatan *Space syntax* memiliki parameter *Connectivity*, *Integrity*, *Topological distance*, *Intelligibility* yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.

Objek Studi kasus yang berhasil menerapkan pendekatan *Space syntax* pada perancangan interior dengan menyelesaikan permasalahan serupa adalah PT. Haleyora Powerindo Bandung yang merupakan perusahaan penyediaan dan pengelolaan SDM yang profesional di bidang operasi dan pemeliharaan transmisi, distribusi tenaga listrik juga bidang pendukung lainnya dengan visi memberikan layanan dengan standar mutu tinggi (Permana et al., 2020). PT. Haleyora Powerindo dalam menjalankan visinya memberikan pelayanan kepada publik juga memperhatikan kebutuhan pegawai agar dapat memberikan pelayanan yang cepat dan memuaskan dengan meningkatkan kualitas konfigurasi ruang

yang belum optimal agar memberikan kenyamanan dalam bekerja. Hal tersebut memiliki persamaan dengan objek perancangan kantor Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dengan memperhatikan konfigurasi ruang menggunakan metode *space syntax* dengan menggunakan *software* depthmapX terhadap ruang kerja yang dianalisis dengan menghasilkan korelasi yang baik antara nilai *connectivity* dan *integrity* dengan melakukan pengelompokan ruang berdasarkan struktur organisasi yang ada menyesuaikan fungsi ruang pada tiap bagiannya dengan menempatkan ruang kerja staf di antara ruang kerja kepala bagian dengan konsep open space agar memberikan rasa keterbukaan, adanya interaksi antar pegawai, ruang yang fleksibel, dan kemudahan seluruh pegawai untuk menjangkau antar ruang kerja dengan mudah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aktivitas pegawai, integrasi dan konektivitasnya baik pada ruang maupun penggunaannya. Melihat bagaimana hubungan antar ruang dengan proses perhitungan yang menggunakan aplikasi *depthmapX* yang menghasilkan kejelasan ruang dengan memiliki konektivitas, konfigurasi, dan pencapaian/kejelasan ruang yang baik. Metode Ini merupakan pendekatan yang sesuai untuk diimplementasikan dalam perancangan kantor.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan diatas, dapat menjadi potensi untuk memajukan dan memperbaiki sistem pelayanan di Indonesia dan memudahkan pengguna data di Indonesia lebih mudah mendapatkan data yang dibutuhkan. Oleh karena itu, perlu perancangan ulang Kantor Badan Pusat Statistik sesuai dengan fungsi utama yaitu memberikan pelayanan data kepada publik. Sehingga, menciptakan ruang yang mampu mempermudah sistem pelayanan dan memberi kepuasan kepada pengunjung dan menciptakan ruang yang mampu memunculkan rasa kolaboratif, inovatif, mempermudah komunikasi juga sinkronisasi antar pengguna. Sehingga, diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan kualitas dan efektifitas kerja pegawai dalam menyelesaikan setiap pekerjaannya.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, kantor Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta memiliki permasalahan interior pada kantor Badan Pusat Statistik yang berkaitan dengan adanya penyederhanaan organisasi dan penyetaraan jabatan, sehingga perlunya tata ruang kerja yang baru dengan perancangan ulang kantor Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. Permasalahan yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara, diantaranya sebagai berikut :

### **A. Permasalahan pada kasus Redesign Kantor BPS Provinsi DKI Jakarta :**

#### **1) Organisasi & Layout Ruang**

- Organisasi ruang pada area kerja yang masih tergolong kurang efisien sehingga dapat menghambat mobilitas pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- Bangunan dinilai kurang memberikan kejelasan ruang pada area kerja maupun area pelayanan pada tiap bagiannya sehingga menjadikan rendahnya hubungan antar pengguna dari segi komunikasi dan interaksi
- Belum adanya perbaikan *layout*/tata ruang pada area kerja yang menyesuaikan jabatan fungsional pada instansi BPS DKI Jakarta.

- Penerapan sistem kubikal pada area kerja yang memberikan sekat sehingga menjadikan gerak pegawai menjadi terbatas dan rendahnya komunikasi dalam menyelesaikan permasalahan.
- 2) Pencahayaan
- Pencahayaan yang kurang nyaman karena penggunaan kaca *darkblue* yang membuat ruang-ruang kerja yang tidak mendapatkan cahaya alami menjadi gelap walau dalam kondisi lampu menyala. Menjadikan kesan ruang yang gelap apabila hanya menggunakan pencahayaan alami.
- 3) Penghawaan
- Ruang kerja produksi yang memiliki bukaan, dengan cahaya matahari yang masuk dengan maksimal, menjadikan ruang terasa pengap jika tidak menggunakan penghawaan buatan.
- 4) Fasilitas
- Terdapat fasilitas kerja dan furnitur yang diletakkan pada area-area yang menghalangi sirkulasi dalam bekerja.
  - Banyaknya dokumen yang diletakkan diatas meja kerja hingga menumpuk, samping meja kerja, dan didepan ruangan mendukung kesan ruang yang berantakan. Menjadikan fokus kerja pegawai terganggu.
  - Kurangnya fasilitas area istirahat dan pantry pada setiap bidang pada area kerja yang keduanya mendukung pegawai untuk tetap bekerja dalam posisi yang berbeda.
- 5) Warna/elemen interior
- Implementasi warna yang tidak senada pada interior kantor antar satu ruang dan ruang lain.
  - Tidak adanya identitas instansi BPS diseluruh area bangunan sebagai pembeda antar ruang

B. Permasalahan pada 2 objek Studi Banding :

- tata letak ruang yang masih belum jelas mempengaruhi aktivitas dan kenyamanan pengguna.
- Terdapat fasilitas kerja dan furnitur yang diletakkan pada area-area yang menghalangi sirkulasi dalam bekerja
- Masih menerapkan sistem kubikal pada area kerja yang menjadi sekat antar pegawai
- Rendahnya kemudahan dalam mencapai ruang-ruang yang memiliki hubungan.
- Kurangnya space yang mendukung privasi pada area kerja pegawai.
- Area fotokopi yang fasilitas dan peletakan pada area kerja yang kurang nyaman, dan menghalangi sirkulasi.

### 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijabarkan, tujuan perancangan dari perancangan Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, yaitu :

1. Bagaimana mendesain kantor dengan tata ruang yang fleksibel dan kolaboratif menyesuaikan organisasi yang fungsional agar membantu efektivitas kerja pegawai dan memberikan pelayanan secara efektif dan efisien ?

2. Bagaimana menyelesaikan permasalahan terkait konfigurasi ruang dengan tingkat kejelasan yang rendah dan meningkatkan kemudahan dalam berkomunikasi dan interaksi antar pegawai kantor BPS Provinsi DKI Jakarta ?
3. Bagaimana menerapkan pendekatan *Space syntax* pada perancangan kantor BPS Provinsi DKI Jakarta?
4. Fasilitas apa saja yang perlu diperbaiki pada bangunan kantor sehingga menciptakan ruang yang kolaboratif dan inovatif pada area kerja, dan menunjang aspek kenyamanan pada area pelayanan kantor BPS Provinsi DKI Jakarta ?

## 1.4 Tujuan dan Sasaran Perancangan

### 1.4.1 Tujuan Perancangan

Berdasarkan rumusan masalah yang dijabarkan diatas, tujuan perancangan dari perancangan Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, yaitu :  
“Merancang interior kantor Badan Pusat Statistik dengan pendekatan *Space syntax* yang memiliki konfigurasi ruang dengan tingkat kejelasan yang baik dengan mudahnya komunikasi dan interaksi yang menciptakan kolaborasi yang baik antar pegawai kantor BPS Provinsi DKI Jakarta.”

### 1.4.2 Sasaran Perancangan

Sasaran perancangan didapat dari analisis permasalahan pada objek perancangan dan penyelesaian permasalahan melalui pendekatan *Space syntax*. Sasaran dari perancangan ulang kantor BPS Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

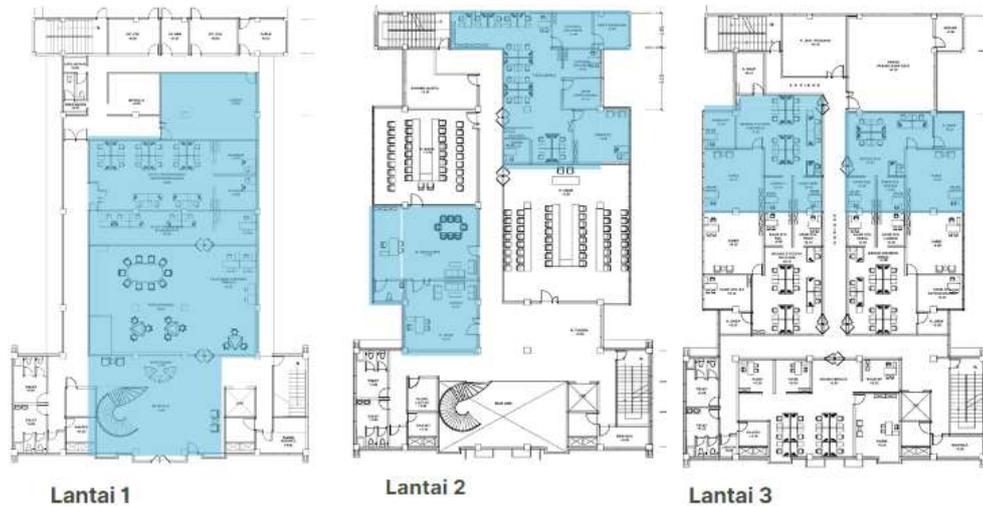
1. Meningkatnya efektivitas kerja pegawai kantor BPS Provinsi DKI Jakarta.
2. Menciptakan konfigurasi ruang dengan tingkat kejelasan yang baik
3. Terciptanya komunikasi juga interaksi yang baik dalam menyelesaikan pekerjaan antar pegawai kantor BPS Provinsi DKI Jakarta dengan metode *Space syntax*
4. Terciptanya ruang yang fleksibel dan kolaboratif
5. Implementasi Identitas instansi pada tiap ruang dari aspek elemen ruang hingga tata ruang.
6. Penerapan warna yang menggambarkan identitas instansi pada *signage, furniture*, dan elemen interior dengan konsep yang inovatif dan menarik.

## 1.5 Batasan perancangan

Adapun batasan perancangan dalam perencanaan re-desain pada kantor Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, Sebagai berikut :

1. Lokasi objek perancangan yang berada di jl. Salemba Tengah, no.36, Paseban, Jakarta Pusat. Berada tepat di seberang jalan utama yang berada di utara bangunan dengan aksesibilitas yang memadai seperti akses menuju transportasi umum. Sebelah barat & selatan terdapat kantor swasta, *street food*. Sisi selatan terdapat rumah warga dan sekolah.
2. Batasan Ruang & Luasan perancangan (800-1000 m<sup>2</sup>) :  
Batasan ruang yang menjadi objek perancangan adalah area kerja internal dan area pelayanan. Bangunan kantor terdapat 4 lantai dengan fungsi lantai 1 sebagai area pelayanan. Lantai 2 dan 3 sebagai area kerja yang dapat diakses oleh pegawai dan pengunjung dengan keperluan tertentu seperti rapat atau kunjungan. Lantai 4

merupakan ruang serbaguna yang digunakan untuk apel pegawai pada hari Senin dan Jumat, dan kegiatan bersama yang tidak memiliki jadwal rutin menyesuaikan jadwal kegiatan khusus instansi BPS. Perancangan ulang yang dilatarbelakangi oleh permasalahan terkait konfigurasi ruang baik pada area pelayanan (lantai 1) maupun area kerja internal (lantai 2-3) yang belum menyesuaikan penyederhanaan struktur organisasi. Sehingga batasan perancangan pada lantai 1 pada area pelayanan, lantai 2 dan 3 pada area kerja.



**Gambar 1. 3 Batasan perancangan Badan Pusat Statistik Prov. DKI Jakarta**  
 Sumber : Dokumen Pribadi 2024

**Tabel 1.1 Batasan Perancangan**

No	Ruang (lantai 1)	Luas (m <sup>2</sup> )
1	Ruang Staff Perlengkapan dan Urusan Dalam	94.15 m <sup>2</sup>
2	Ruang Pelayanan Statistik Terpadu & Ruang staff Diseminasi	188.8 m <sup>2</sup>
3	Lobi	88.2 m <sup>2</sup>
<b>No Ruang (lantai 2)</b>		
3	Ruang tata Usaha	77.68 m <sup>2</sup>
4	Ruang KA + Sekre	85.2 m <sup>2</sup>
5	Ruang Rapat	69.70 m <sup>2</sup>
6	Ruang Vicon	121.8 m <sup>2</sup>
<b>No Ruang (lantai 3)</b>		
5	Ruang Statistik IPDS	67.2 m <sup>2</sup>
6	Ruang Statistik Distribusi	67.2 m <sup>2</sup>
<b>Total</b>		<b>859,93 m<sup>2</sup></b>

3. Pengguna ruang yang merupakan pegawai BPS DKI Jakarta, *security*, dan *cleaning service* serta para pengunjung yang membutuhkan pelayanan data.
4. Standarisasi yang diterapkan pada objek perancangan berdasarkan aktivitas pengguna, yang terjadi didalam ruang terkait standar ergonomi dan antropometri, suasana ruang terkait pencahayaan, penghawaan, dan standarisasi tata ruang yang ideal.

5. Pendekatan *Space syntax* yang digunakan dalam perancangan dengan analisis konfigurasi pada tiap ruang kerjanya yang menghasilkan tingkat konektivitas ruang, jarak antar ruang, pencapaian ruang dan kejelasan ruang yang baik.
6. Peraturan yang digunakan adalah yang berkaitan dengan objek perancangan

## 1.6 Metode Perancangan

Dalam sebuah perancangan perlu adanya metode yang dilakukan untuk melakukan tiap tahapan proses perancangan sebagai berikut :

### A. Pengumpulan data

#### 1. Data Primer

- **Survey dan observasi objek perancangan**

Informasi utama dalam penyusunan desain ini diperoleh melalui penelitian langsung dari kasus yang dilakukan di Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. Proses yang dilakukan pada tahap ini yaitu mengamati, menganalisis, mendengar, mencatat. Pada tahap ini, adalah proses untuk mengetahui bagaimana aktivitas yang terjadi pada objek perancangan, siapa saja penggunanya, dan apa saja yang ada didalamnya. Proses survey dan observasi juga dilakukan pada objek studi banding.

- **Dokumentasi**

Pengumpulan data dokumentasi dilakukan pada saat observasi objek perancangan kantor BPS Provinsi DKI Jakarta dan objek studi banding pada kantor Badan Pusat Statistik RI dan kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat sebagai pelengkap data dan memperkuat penelitian. Dokumentasi meliputi data kondisi setiap ruang dilihat dari elemen interior, penataan furnitur hingga permasalahan yang ditemukan.

- **Wawancara**

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang spesifik dan mendalam terkait objek perancangan. Wawancara dilakukan kepada para pegawai Badan pusat Statistik pada objek perancangan maupun yang menjadi objek studi banding dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan ditujukan kepada pihak yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Metode ini dilakukan agar mendapatkan hasil atau data yang akurat. Hasil wawancara memberikan informasi, permasalahan serta keinginan pada objek yang akan dirancang. Wawancara dilakukan kepada 3 sampai 4 pegawai tetap yang memiliki aktivitas rutin pada objek penelitian. Pertanyaan yang diajukan seputar profil perusahaan, aktivitas dan kendala yang ada pada area kerja dan fasilitas apa saja yang perlu diperbaiki atau ditambahkan dalam menunjang aktivitas didalamnya. Jawaban yang diberikan terkait dengan penelitian adalah kendala mengenai tata ruang pada area kerja maupun area pelayanan yang masih belum sesuai standar dan menyesuaikan perubahan struktur organisasi yang fungsional. Sehingga dari jawaban ini mengkonfirmasi hasil observasi yang sudah dilakukan.

#### 2. Data sekunder

- **Studi Literatur**

Mengumpulkan data dari literatur jurnal, buku, artikel, laporan penelitian, hingga publikasi daring sebagai salah satu tahap pengumpulan data dengan mencari teori relevan dengan studi kasus yang ditemukan, kemudian dijadikan acuan dan referensi dalam proses perancangan kantor BPS Provinsi DKI Jakarta. Studi literatur yang mengacu pada penelitian sebelumnya antara lain: 1) Peranan Tata Ruang Kantor dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan BPS Kabupaten Labuhan Batu Sumatera Utara. 2) Konfigurasi Ruang Berdasarkan Kualitas Konektivitas Ruangan dalam Perancangan Kantor dengan Analisis *Space syntax*. 3) Perancangan Balai Latihan Kerja Industri dengan Pendekatan Pola Pergerakan Pengguna. Penelitian sebelumnya yang diambil menggunakan metode pendekatan *Space syntax* merupakan metode yang diterapkan juga pada objek perancangan, agar dapat menjadi referensi dan acuan dalam menyelesaikan permasalahan.

- **Studi Banding**

Studi banding dilakukan pada 2 objek dengan tipologi yang sama dengan kantor BPS Provinsi DKI Jakarta yaitu :

- Objek 1 : Kantor Badan Pusat Statistik RI  
Alamat : Jl. Dr. Sutomo 6-8 Jakarta Pusat
- Objek 2 : Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.  
Alamat : Jl. Phh. Mustofa No.43, Neglasari, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung Jawa Barat.

Alasan pemilihan 2 objek studi banding diatas adalah merupakan jenis instansi yang sama sehingga pengguna dan aktivitas yang dilakukan juga sama. Pada tahap observasi dan studi banding ini didapatkan hasil berupa data kebutuhan dan kualitas sebuah ruang, fasilitas yang dibutuhkan, aktivitas pengguna, hubungan antar ruang, hingga karakter/ ciri khas masing-masing ruang yang dapat menjadi acuan untuk memperbaiki permasalahan yang ada pada objek perancangan.

## **B. Analisa Data**

Dari pengumpulan data yang terjadi dilapangan (primer) dan data literatur (sekunder) yang telah dilakukan, selanjutnya data tersebut akan dianalisis sebagai referensi sehingga menghasilkan desain untuk menjawab permasalahan pada objek perancangan. Berikut merupakan tahapan dan proses dari analisis data :

### **1. Pengolahan data primer dan data sekunder**

Berdasarkan hasil dari pengumpulan dan pengolahan data di lapangan (primer) dan data literatur (sekunder) yang telah dilakukan, tahap selanjutnya adalah data tersebut akan dianalisis dan dibandingkan hingga menemukan permasalahan pada objek perancangan. Hasil akhir dari analisis data ini yaitu berupa solusi permasalahan yang kemudian akan diimplementasikan dalam proses desain pada objek perancangan. Tahap ini mengolah data dari hasil survey, wawancara, dokumentasi dan penelitian terdahulu. Data yang diperoleh dari kajian literatur dan penelitian terdahulu digunakan untuk memperkuat hasil analisis penelitian terkait pendekatan yang digunakan yaitu *Space syntax*. Hasil dari metode pendekatan *Space syntax* yang digunakan, akan menjadi pembanding terkait korelasi antar hasil data primer dan hasil analisis *DepthmapX*.

## 2. Interpretasi hasil analisis pada perancangan

- **Programming**

Tahap *programming* adalah tahap analisis yang didasari oleh data primer yang terdiri dari posisi site, tata letak, aktivitas, pengguna, dan identitas instansi. Berdasarkan data yang diperoleh, akan menghasilkan alternatif zoning, blocking, kebutuhan ruang, organisasi ruang yang baik dan nyaman.

- **Perancangan**

Tahap perancangan diolah berdasarkan permasalahan pada objek perancangan dengan menyesuaikan jenis metode dan pendekatan yang digunakan hingga mendapatkan desain yang sesuai. Berikut tahapan dari perancangan :

- **Tema Konsep**

Tahapan dalam menentukan konsep ruang yang ingin diimplementasikan pada ruang dengan memperhatikan proses penyelesaian masalah pada objek. Tema konsep diterapkan pada suasana ruang, sirkulasi, tata letak, bentuk furnitur, pencahayaan, penghawaan, material, warna, dan aksen.

- **Desain pada software**

Tahapan ini menjelaskan proses merancang desain yang dimulai dari sketsa terkait konsep bentuk yang akan diimplementasikan, kemudia dituangkan dalam gambar 2D pada *software Autocad* dengan skala yang sesuai. Setelah proses desain 2D dilanjutkan dengan pemodelan desain pada *software Sketchup* untuk memberikan gambaran langsung bagaimana sirkulasi pada ruang, kenyamanan tata letak ruang dan furnitur, dan kemudahan dalam akses ruang. Setelah proses pemodelan pada *Sketchup*, dilanjutkan dengan proses rendering pada *software* Enscape untuk mengetahui bagaimana Ambience ruang yang didukung dengan konsep pencahayaan yang akan diterapkan pada desain. Tahap pada *software* rendering ini adalah tahap untuk mengetahui bagaimana suasana ruang yang didapat setelah mengimplementasikan proses tema dan konsep pada semua elemen interior objek perancangan.

- **Presentasi**

Output dari tahap ini adalah dalam bentuk maket atau *prototype*, portfolio dan *moodboard* perancangan. Maket merupakan interpretasi dari tahapan pemodelan yang direalisasikan dalam bentuk 3D dengan skala tertentu. Sehingga pada tahap ini dapat dilihat bagaimana suasana dan organisasi ruang dari hasil desain objek perancangan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

### 1.7 Manfaat Perancangan

Adapun manfaat dari perancangan kantor BPS Provinsi DKI Jakarta adalah :

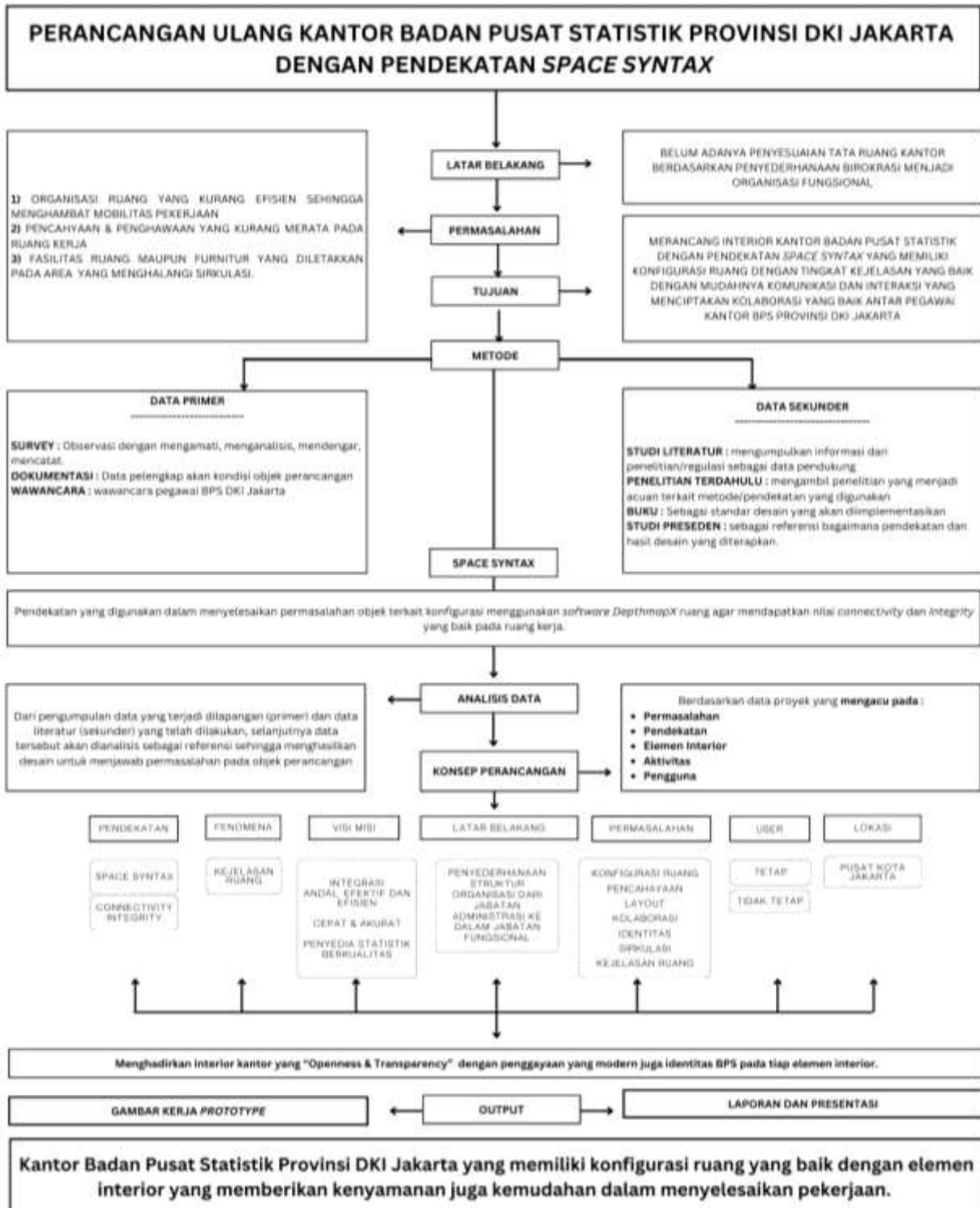
a) Manfaat bagi masyarakat/komunitas

Manfaat perancangan ulang ini untuk masyarakat diharapkan mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan nyaman baik dalam akses ruang maupun fasilitas pelayanan publik saat berada di Kantor BPS Provinsi DKI Jakarta

b) Manfaat bagi keilmuan interior

Manfaat bagi keilmuan interior adalah mendapatkan referensi apabila akan mendesain ulang kantor pemerintahan serta mendapatkan opini masyarakat yang baik terkait pelayanan.

## 1.8 Kerangka Berpikir Perancangan



Gambar 1. 4 Kerangka Berpikir  
Sumber : Dokumen Pribadi, 2024

## **1.9 Pembaban Laporan TA**

Tahapan metode perancangan yang digunakan untuk perancangan Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pendahuluan merupakan uraian dasar tentang fenomena latar belakang dari perancangan ulang interior Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta yang berisi identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan sasaran perancangan, batasan perancangan, kerangka berfikir, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN REFERENSI DESAIN**

Kajian Pustaka dan referensi desain merupakan uraian dari kajian literatur sebagai penguat fenomena pada latar belakang hingga uraian yang menunjang data-data perancangan seperti studi komparasi, standar besaran ruang, deskripsi proyek perancangan dan kajian literatur terkait pendekatan yang akan diimplementasikan pada objek perancangan.

### **BAB III : DESKRIPSI PROJEK DAN DATA ANALISIS**

Deskripsi proyek dan data analisis merupakan uraian dari analisa studi banding kantor BPS Jawa Barat dan BPS RI. Tabel komparasi dari kedua objek studi banding beserta kesimpulannya kemudian menjelaskan deskripsi dan analisa proyek yang terdiri dari analisa *site*, alur aktivitas, kebutuhan ruang, persyaratan umum ruang, dan kebutuhan mebel pada objek perancangan.

### **BAB IV : TEMA DAN KONSEP IMPLEMENTASI PERANCANGAN**

Tema dan konsep implementasi perancangan merupakan uraian-uraian tema perancangan, konsep perancangan, organisasi ruang, *layout*, bentuk, material, warna, pencahayaan dan penghawaan, keamanan dan akustik beserta pengaplikasiannya pada kantor BPS Provinsi DKI Jakarta

### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan dan saran merupakan bagian dari penulisan laporan yang berisi tentang kesimpulan dan saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**